

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi inklusif menjadi fokus utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan, baik itu melalui Bank Sentral maupun pemerintah. Berdasarkan data Bappenas (2021) pencapaian inovasi baru melalui sektor produktif dipandang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama dinegara berkembang. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan (Azwar, 2015).

Pembangunan ekonomi suatu wilayah dikatakan inklusif apabila wilayah tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2021) perkembangan pembangunan ekonomi inklusif berkorelasi positif dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selama periode tahun 1999 hingga tahun 2021, angka kemiskinan turun dari 24% menjadi sekitar 12%, tetapi pada saat yang sama, penurunan kemiskinan juga diwarnai dengan peningkatan indikator ketimpangan ekonomi. Indeks Gini rasio yang mengukur besarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, meningkat dari 0.3 menjadi 0.4 pada periode yang sama. Artinya, pembangunan inklusif yang terjadi selama

periode tersebut lebih banyak dirasakan manfaatnya bagi kelompok kaya. Semakin miskin seseorang, semakin sedikit porsi manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil pembangunan.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan ekonomi inklusif berjalan sesuai harapan dengan membangun strategi utama pembangunan inklusif. Berdasarkan data Bappenas (2022) indeks pembangunan ekonomi inklusif mulai diperhatikan dan lebih difokuskan dimulai pada tahun 2011, dimana pada tahun tersebut pemerintah telah memiliki komitmen bahwa pertumbuhan ekonomi dimasa depan lebih diperhatikan pada pembangunan inklusif, sehingga tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja.

Berdasarkan data Bappenas (2022), dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90% pada 2024 mendatang. Bahkan dalam beberapa artikel disebutkan, jika salah satu keberhasilan pemerintah di masa pemerintahan Joko Widodo adalah berjalannya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif yang tercermin pada turunnya rasio kesenjangan pengeluaran antar penduduk (rasio gini). Kementerian keuangan dalam mewujudkan ekonomi inklusif dan berdaya saing dilakukan dengan menyusun peta inisiatif baru program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dengan harapan agar berkesinambungan dan fiskal terjaga melalui pendapatan yang optimal.

Laju ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global selama lima tahun terakhir yaitu 2018 - 2022 berhasil tumbuh kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi ini bersifat inklusif, seperti halnya terlihat pada kesenjangan yang

berhasil di turunkan yang dibuktikan dengan rasio gini yang mengalami penurunan serta tingkat kemiskinan juga ikut menurun. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia, masih terdapat beberapa Provinsi yang kesejangan, ketimpangan serta tingkat kemiskinan yang tinggi.

Pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia tumbuh seiring dengan perkembangan inklusif keuangan nasional, dimana inklusif keuangan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Terciptanya akses keuangan yang luas ke masyarakat juga ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bappenas (2022), pertumbuhan ekonomi nasional dihitung dari indeks pembangunan ekonomi inklusif. Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tujuan utama pembangunan yang inklusif adalah mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan sebagai jaring pengaman sosial.

Menurut data BPS Indonesia (2021) pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Strategi utama pembangunan inklusif yaitu penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, peningkatan pelayanan publik dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi inklusif antar Provinsi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Perkembangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi dapat berupa kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

dan faktor non ekonomi. Menurut Azwar (2015) terdapat beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di negara ini yaitu tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan yang merupakan indikator dari pilar kedua dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi Indonesia baik pada level nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka diperlukan penggunaan indeks pembangunan ekonomi inklusif, dikarenakan untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia dilihat melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 9 sub pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi. Pilar 1 (satu) yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang terdiri dari sub pilar pertumbuhan ekonomi, sub pilar kesempatan kerja, sub pilar infrastruktur ekonomi.

Pilar 2 (kedua) yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan yang terdiri dari sub pilar ketimpangan dan sub pilar kemiskinan. Pilar 3 (tiga) yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan yang terdiri dari sub pilar kapabilitas manusia, infrastruktur dasar dan keuangan inklusif. Namun, dalam penelitian ini penulis memfokuskan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dilihat dari pilar 2 (kedua) yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan yang terdiri dari sub pilar ketimpangan sub pilar kemiskinan, dimana sub pilar ketimpangan dengan indikatornya yaitu Rasio Gini, Sumbangan Pendapatan Perempuan Dan Rasio Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa

dan Kota. Sedangkan sub pilar kemiskinan dengan indikatornya yaitu Presentase Penduduk dan Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita Perhari. Dengan mengambil enam Provinsi dikarenakan ke enam Provinsi tersebut merupakan Provinsi dengan ketimpangan dan kemiskinan yang tertinggi. Artinya enam provinsi yang terpilih tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan dan berdampak juga kepada pembatasan hubungan sosial antar provinsi. Selain itu ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti gangguan tenaga kerja dan lainnya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Rasio Gini, Pendapatan Perempuan, Tingkat Penduduk Miskin dan
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Enam Provinsi Indonesia
(2015 - 2021)

Provinsi	Tahun	IPEI (poin)	Rasio Gini (angka)	Pendapatan Perempuan (%)	Tingkat Peduduk Miskin (%)
Aceh	2015	6.44	0,330	33,72	17,11
	2016	6.64	0,333	34,51	16,43
	2017	5.86	0,329	34,56	15,92
	2018	5.44	0,325	34,57	15,68
	2019	5.55	0,319	34,59	15,01
	2020	5.21	0,323	34,83	15,43
	2021	5.27	0,324	34,67	15,53
Sumatera Selatan	2015	5.94	0,334	34,80	13,77
	2016	6.18	0,346	33,34	13,39
	2017	5.61	0,365	26,43	13,10
	2018	5.5	0,341	20,70	12,82
	2019	5.3	0,341	27,09	12,56
	2020	5.23	0,332	31,21	12,98
	2021	4.94	0,340	31,21	12,79
DI Yogyakarta	2015	6.49	0,420	33,47	13,16
	2016	6.61	0,425	26,79	13,10
	2017	11.6	0,440	38,36	12,36

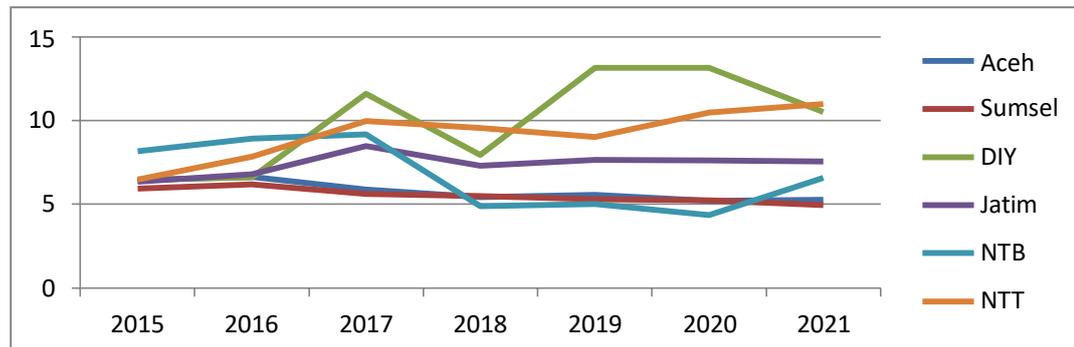
Tabel 1.1 Lanjutan...

Tabel 1.1 Lanjutan...

Provinsi	Tahun	IPEI (Poin)	Rasio Gini (angka)	Pendapatan Perempuan (%)	Tingkat Peduduk Miskin (%)
DI Yogyakarta	2018	7.93	0,442	25,77	11,81
	2019	13.15	0,432	36,59	11,44
	2020	13.15	0,421	39,05	12,80
	2021	10.53	0,436	39,43	11,91
NTB	2015	8.16	0,360	28,71	16,54
	2016	8.92	0,362	28,15	16,02
	2017	9.18	0,333	28,99	15,05
	2018	4.89	0,342	32,70	14,63
	2019	5.02	0,321	29,12	13,88
	2020	4.34	0,345	29,80	14,32
	2021	6.58	0,384	31,81	13,83
NTT	2015	6.49	0,348	31,80	22,58
	2016	7.86	0,362	32,98	22,01
	2017	9.97	0,391	31,00	21,38
	2018	9.57	0,384	29,87	21,03
	2019	9.02	0,345	32,90	20,62
	2020	10.52	0,357	29,81	21,21
	2021	11.02	0,339	27,89	20,44
Jawa Timur	2015	6.34	0,403	33,48	12,28
	2016	6.81	0,402	32,22	11,85
	2017	8.49	0,415	28,15	11,20
	2018	7.29	0,379	37,92	10,85
	2019	7.67	0,370	27,53	10,20
	2020	7.62	0,366	34,94	11,46
	2021	7.56	0,374	31,50	10,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Tabel di atas dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini untuk memberikan gambaran lengkap mengenai variabel dalam penelitian penulis. Pendapatan perempuan dalam penelitian ini menggunakan persentase dikarenakan dilihat dari indeks pemberdayaan gender (IDG). Untuk lebih jelasnya diuraikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia dalam angka, 2022

Gambar 1.1 Pergerakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pergerakan indeks pembangunan ekonomi inklusif dalam enam Provinsi dalam jangka waktu 7 tahun memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) mengalami fluktuasi dimana adanya pergerakan kenaikan dan penurunan. Dimana Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan kondisi puncak di Provinsi Aceh terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,64, artinya pada tahun tersebut Provinsi Aceh baru saja mengalami pemulihan pasca terjadinya tsunami, sehingga adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Kemudian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Sumatera Selatan dengan kondisi puncak yaitu terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,18, kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi tersebut, sehingga pada tahun 2016 kondisi tersebut semakin membaik dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Jawa Timur Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan kondisi puncak terjadi pada tahun 2017 sebesar 8,49. Kondisi tersebut

terjadi dikarenakan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk mengatasi indikator-indikator ekonomi inklusif yang masih rendah ditahun sebelumnya. Selanjutnya Provinsi NTB kondisi puncak terjadi pada tahun 2017 sebesar 9,18 dikarenakan pada tahun tersebut NTB baru saja mengalami pemulihan ekonomi daerah yang sempat menurun drastis ditahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2017 pemerintah membangkitkan ekonomi Provinsi NTB dengan kebijakan fiskal dengan tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik, pengentasan kemiskinan dan lainnya. Kemudian yang terakhir Provinsi NTT kondisi puncak pada tahun 2021 sebesar 11,02. Pada kondisi puncak ini IPEI dikatakan berhasil membangun ekonomi menjadi lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakatnya dikarenakan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berada pada kondisi baik.

Kemudian kondisi terendah IPEI pada tahun 2020-2021 yaitu terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan dan NTB sebesar 5,21, 4,94, dan 4,34, kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi atau wabah Covid-19 di Indonesia, sehingga semua kegiatan ekonomi dihentikan atau dibatasi, hal ini berdampak kepada penurunan pembangunan ekonomi inklusif. Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur dan NTT kondisi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,34 dan 6,49. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pada tingkat ketimpangan serta ketidakmerataan penduduk miskin di wilayah tersebut. Sedangkan kondisi rata-rata di enam Provinsi tersebut terjadi pada tahun 2018 berada pada nilai rata-ratanya adalah 5-7. Pada kondisi ini terdapat keseimbangan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Artinya pada saat ketimpangan pendapatan

berada pada kondisi rata-rata, maka hal tersebut akan di ikuti oleh tingkat kemiskinan yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Pemerintah tentunya perlu bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia, dengan berbagai kebijakan yang mendukung berkembangnya ekonomi inklusif. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah dan pengelola keuangan negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengarahkan berbagai kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi inklusif. Hal ini sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Musgrave (2010) bahwa peran keuangan negara mencakup fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan fiskal. Sebagai contoh pemerintah dapat menggunakan fungsi distribusi untuk mengarahkan pendapatan pajak yang dipungut dari orang-orang mampu sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.

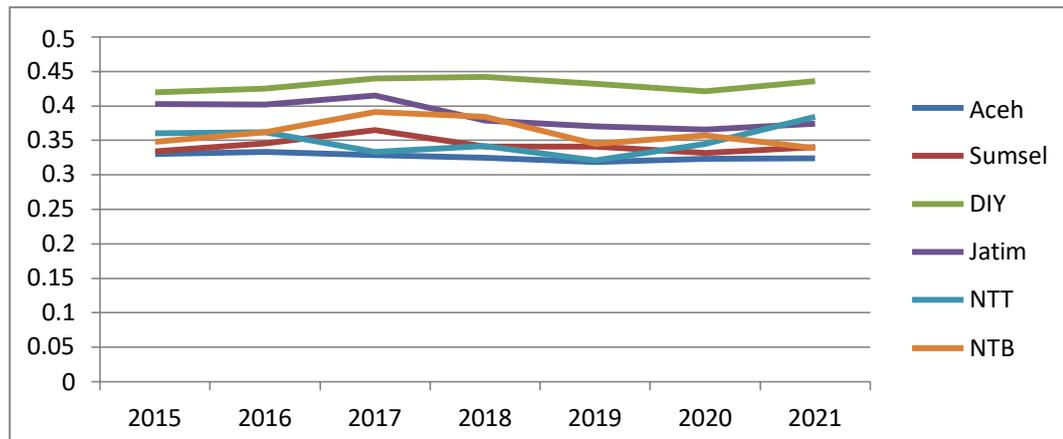
Menurut Sjafrizal (dalam Siara, 2021) ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, di setiap daerah biasanya terdapat wilayah yang maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar

wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di suatu daerah berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021) adalah dengan melihat koefisien gini (*gini ratio*). Nilai rasio gini yaitu antara nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini lebih kecil dari 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35 (Shofia, 2018).

Rasio gini berperan penting dalam pembangunan ekonomi inklusif, rasio gini sangat berperan dalam mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Jika rasio gini mengalami peningkatan, maka akan berdampak kepada ketimpangan yang terjadi di berbagai wilayah seperti tingginya pengangguran dan mengurangi pendapatan perkapita Negara. Namun, hal tersebut dapat dicegah oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pembangunan di daerah yang terjadinya ketimpangan, tujuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Azwar, 2015).

Perkembangan rasio gini dalam enam Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia dalam angka, 2022

Gambar 1.2 Pergerakan Ratio Gini di Enam Provinsi Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa enam Provinsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan ketimpangan atau mengalami permasalahan naik turun pada rasio gini, dimana kondisi puncak pergerakan rasio gini antar Provinsi di Indonesia terjadi pada tahun 2016 di Provinsi Aceh sebesar 0,333, hal ini dikarenakan pada masa pemulihan pasca terjadinya tsunami, Provinsi Aceh dalam proses perbaikan ekonomi menjadi lebih baik, walaupun adanya peningkatan pada rasio gini tidak berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi inklusif, dikarenakan rasio gini mengalami kenaikan dibawah 0,4 atau masih berada dalam kategori sedang. Kondisi Puncak pergerakan rasio gini di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur dan NTT terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,365, 0,415 dan 0,391, hal ini dikarenakan terjadinya kontraksi pada perekonomian di Provinsi tersebut, seperti penyempitan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan di Provinsi NTB kondisi puncak pergerakan rasio gini terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,384, hal tersebut disebabkan oleh adanya

pandemi ditahun sebelumnya, sehingga pemulihan ekonomi secara keseluruhan di Provinsi NTB belum membaik.

Pergerakan nilai rasio gini pada kondisi terendah di Provinsi Aceh dan Jawa Timur terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 0,319 dan 0,366. Hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan kebijakan pemerataan pendapatan bagi masyarakatnya, sehingga pemerataan pendapatan menjadi semakin baik dan meningkat. Artinya di kedua Provinsi tersebut ketimpangan berada pada kategori rendah. Sedangkan kondisi rata-rata di enam Provinsi Indonesia terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yang artinya di Provinsi Indonesia setiap penduduk sudah menerima pendapatan dengan jumlah yang sama atau merata.

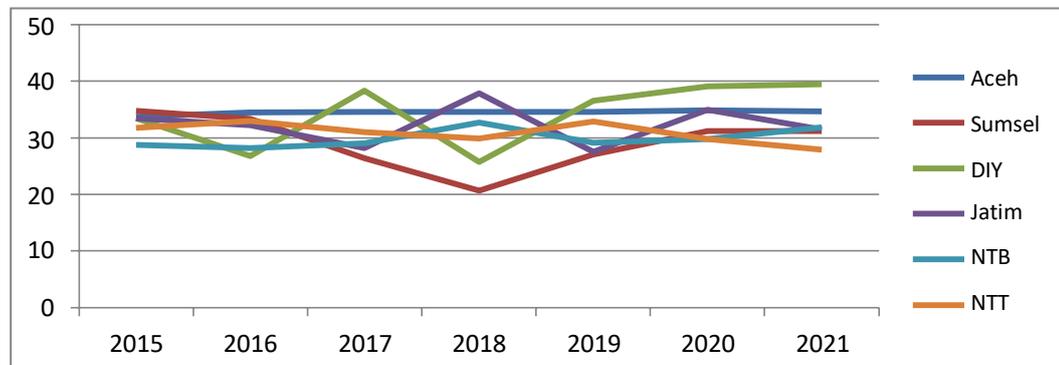
Kaitan indeks gini dengan ketimpangan merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks gini ini terdiri dari nilai 0 sampai 1. Jika indeks gini senilai 0 maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, yang artinya setiap orang sudah menerima pendapatan dengan jumlah yang sama. Sedangkan jika indeks gini sama dengan 1 maka artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, atau dengan kata lain pendapatan hanya diterima oleh satu orang ataupun satu kelompok saja.

Menurut *World Economic Forum (WEF)*, (2019) menyatakan bahwa masih ada jarak yang besar mengenai upah tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki. Forum ini juga menyatakan bahwa dalam konteks penghasilan setidaknya membutuhkan waktu sebanyak 202 tahun untuk mencapai kesejahteraan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kesetaraan gender yang diimpikan tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Di Indonesia, ketimpangan

penghasilan tidak banyak terjadi pada laki-laki maupun perempuan di posisi dan perusahaan yang sama. Malahan permasalahan kesenjangan lebih banyak dikarenakan ketidakseimbangan tenaga kerja. Salah satunya yaitu lebih banyak pria yang menempati posisi atas dari wanita. Padahal jika dilihat dari segi jumlah penduduk perempuan adalah asset pembangunan yang sangat penting dalam suatu wilayah.

Kesejahteraan suatu keluarga selalu didukung oleh pendapatan keluarganya. Pendapatan keluarga merupakan hasil yang diperoleh anggota keluarga setelah melakukan usaha, yang semuanya tidak terlepas dari adanya mata pencaharian atau lebih lazim disebut dengan pekerjaan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga atau anggota keluarga. Permasalahannya sekarang, upaya untuk mencapai keluarga sejahtera, bukanlah pekerjaan mudah. Banyak tantangan, permasalahan dan hambatan yang akan ditemui oleh setiap keluarga sebelum mencapai kondisi yang diinginkan dan itu disebabkan oleh tingkat pendapatan. Berdasarkan uraian Badan Pusat Statistik (2021) pendapatan laki-laki dan perempuan jauh berbeda, dimana pendapatan rumah tangga laki-laki jauh lebih tinggi daripada rumah tangga perempuan, pada tahun 2017 jumlah pendapatan rumah tangga laki-laki adalah sebesar 75,63% sedangkan perempuan sebesar 36,62%. Pada tahun 2018-2019 jumlah pendapatan rumah tangga laki-laki sebesar 76,36% dan 75,88%, sedangkan perempuan sebesar 36,70% dan 37,10%. Pendapatan rumah tangga laki-laki tahun 2020-2021 sebesar 77,65% dan 77,54%, sedangkan perempuan sebesar 37,26% dan 37,22%. Artinya pendapatan dalam rumah tangga masih di dominasi oleh kepala rumah tangga yaitu laki-laki.

Pergerakan nilai pendapatan perempuan dalam enam Provinsi di Indonesia tahun 2015-2021 dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia dalam angka, 2022

Gambar 1.3 Pergerakan Pendapatan Perempuan di Enam Provinsi Indonesia

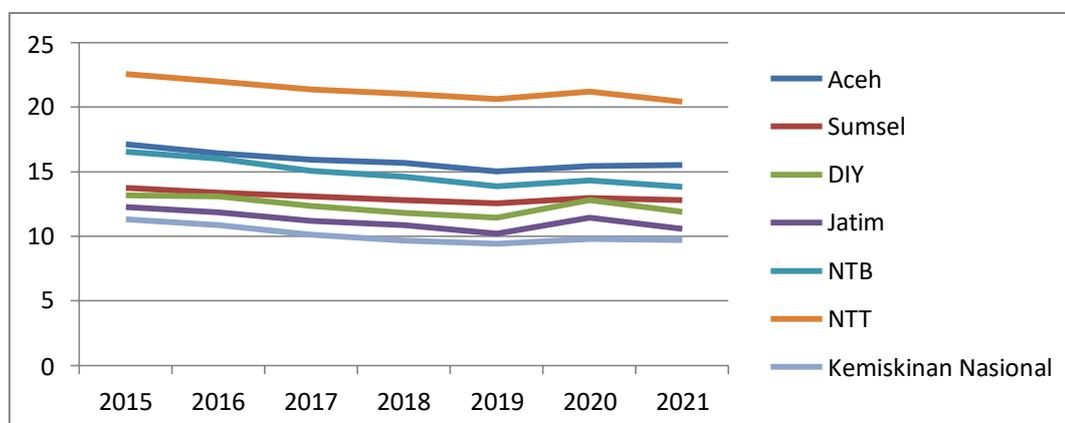
Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa pendapatan perempuan setiap tahunnya dalam Enam Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Artinya perempuan lebih banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi inklusif. Kondisi puncak pada pergerakan pendapatan perempuan terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar 34,83%, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dimana pada masa itu kegiatan ekonomi di hentikan atau dikurangi. Sehingga banyak dari laki-laki yang kehilangan pekerjaan karena pembatasan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan mengambil alih untuk memperoleh pendapatan demi memperoleh biaya hidup rumah tangganya. Pergerakan kondisi puncak pendapatan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2015 sebesar 34,80%, kondisi ini terjadi karena tingginya tingkat pengangguran yang terjadi, sehingga perempuan berinisiatif membangun kegiatan ekonomi seperti kerajinan sandang yang mampu meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi tersebut. Sedangkan pergerakan

kondisi puncak pendapatan perempuan di Provinsi NTB, NTT dan Jawa Timur yaitu terjadi pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada Provinsi tersebut terjadinya pemerataan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan yang semakin membaik.

Pergerakan kondisi terendah pendapatan perempuan terjadi di Provinsi DIY dan Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,77% dan 20,70%, artinya kondisi ini terjadi di ikuti dengan tingginya tingkat kemiskinan di dua Provinsi tersebut. Sedangkan di Jawa Timur terjadi pada tahun 2019 sebesar 27,53%, dimana lapangan pekerjaan yang banyak terbuka di Provinsi Jawa Timur adalah sektor Non-formal, sehingga wanita jarang bekerja di sektor tersebut dan lebih dominan di sektor formalnya. Sedangkan kondisi rata-rata berada pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan setelah terjadinya pandemi, banyak perempuan mengalami kehilangan mata pencaharian disebabkan ruang lingkup pekerjaan menjadi lebih sempit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yohana (2014) yang menyatakan bahwa perempuan merupakan pendorong perekonomian suatu wilayah. Sehingga keterlibatan perempuan harus lebih dipertimbangkan untuk mengangkat perekonomian menjadi lebih baik, seperti keterlibatan perempuan dalam ekonomi lokal, politik, dan bidang pembangunan.

Tujuan utama pembangunan yang inklusif adalah mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selama periode tahun 1999 hingga tahun 2021, angka kemiskinan turun dari 24% menjadi sekitar

12%, tetapi pada saat yang sama, penurunan kemiskinan juga diwarnai dengan peningkatan indikator ketimpangan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode tersebut lebih banyak dirasakan manfaatnya bagi kelompok kaya. Semakin miskin seseorang, semakin sedikit porsi manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil pertumbuhan. Selanjutnya pergerakan tingkat penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia dalam angka, 2022

Gambar 1.4 Pergerakan Tingkat Penduduk Miskin dan Kemiskinan Nasional

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, dijelaskan bahwa tingkat penduduk miskin antar Provinsi di Indonesia juga mengalami fluktuasi. Kondisi puncak pergerakan penduduk miskin terjadi pada tahun 2015 di enam Provinsi Indonesia. Artinya pada kondisi puncak penduduk miskin semakin banyak dan mengakibatkan ketimpangan menjadi tinggi. Kondisi terendah penduduk miskin di wilayah Provinsi Indonesia terjadi di Aceh, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, artinya di Provinsi tersebut sudah merealisasikan kegiatan pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih besar, seperti meningkatkan alokasi

anggaran daerah untuk mendukung UMKM dan lainnya. Sedangkan kondisi rata-rata terjadi pada tahun 2018-2019, yang artinya adanya kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik di enam Provinsi tersebut.

Menurut Azwar (2016) fenomena tersebut dikarenakan pertumbuhan yang terjadi hanya disumbang oleh sekelompok kecil masyarakat saja. Jika hal tersebut terjadi, masyarakat miskin akan semakin tersisihkan karena kecilnya kontribusi mereka terhadap aktivitas ekonomi. Pada gilirannya, ketimpangan pendapatan akan semakin melebar karena masyarakat yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Upaya menekan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi seharusnya saling menguntungkan. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin pada dasarnya akan meningkatkan kualitas SDM. Hal tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga serta kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan rangsangan permintaan barang dan jasa. Hubungan antara pertumbuhan inklusif dan tenaga kerja tersebut juga dikemukakan oleh World Bank (2019). Pertumbuhan yang inklusif akan tercapai melalui pertumbuhan industri padat karya dan perbaikan kualitas tenaga kerja. Kedua hal tersebut akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong terjadinya kondisi *full employment* (Felipe, 2012).

Berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode mengukur pertumbuhan inklusif. Isu pertumbuhan inklusif semakin menarik dengan munculnya kelas menengah yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah inklusif. Namun

pada kenyataannya, kelas menengah yang muncul di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi. Persoalan kesenjangan tentunya berlawanan dengan konsep pertumbuhan inklusif dimana pertumbuhan mampu menurunkan ketimpangan. Hal ini juga berhubungan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2019) yang menyatakan bahwa pendekatan keberhasilan pembangunan oleh pemerintah selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan. Ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah tercapai, ternyata permasalahan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak serta merta dapat diselesaikan. Kondisi ini yang menyebabkan kualitas pertumbuhan ekonomi dipertanyakan. Paradigma pembangunan ekonomi kedepan seharusnya tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan yang bersifat inklusif. Kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif adalah komponen penting dari strategi Pemerintah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penelitian Hartati (2021) menyatakan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel ketimpangan dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui implikasi kebijakan pemerintah yaitu penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pendidikan vokasi, penguatan program kesehatan melalui penambahan fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, hingga memaksimalkan kartu Indonesia sehat dan BPJS.

Penelitian Rahmawati (2021) dengan metode penelitian kuantitatif dengan model uji statistika. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara covid-19 yang telah menimbulkan berbagai dampak di negara dan bangsa. Dampak dari covid-19 yang sudah menyebabkan ekonomi mengalami shock juga berpengaruh terhadap ekonomi inklusif. Penelitian Ramadhan (2019) dengan model analisis inferensial menyatakan bahwa inklusivitas berpengaruh terhadap ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian Prabandi (2018) menyatakan bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum sepenuhnya terjadi. Terbukti dengan masih sedikitnya jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Pada penelitian ini pendapatan per kapita, fiscal policy yang dilihat melalui anggaran pendidikan dan kesehatan, serta rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dalam mendukung terwujudnya percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Berdasarkan studi terdahulu yang pernah dilakukan, semuanya membahas mengenai pertumbuhan/pembangunan ekonomi inklusif. Yang membedakan penelitian sebelumnya atau terdahulu dengan penelitian penulis adalah terdapat pada model analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Kemudian pada objek penelitian yaitu tidak semua penelitian terdahulu menggunakan objek dalam bentuk data panel.

Berdasarkan permasalahan diatas, ditinjau dari sisi ketimpangan yang semakin besar, penurunan angka kemiskinan tidak sepenuhnya sukses mencapai target pembangunan ekonomi yang inklusif. Penurunan kemiskinan juga menutupi besarnya kerentanan sebagian besar kelompok masyarakat terhadap gejolak sosial

dan ekonomi yang tiba-tiba. Sebagai contoh, pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dengan cepat mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada sedikit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Enam Provinsi Indonesia**”.

Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Rasio Gini terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh rasio gini, pendapatan perempuan dan tingkat penduduk miskin terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di enam Provinsi Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Rasio Gini terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh Rasio Gini, Pendapatan Perempuan Dan Tingkat Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di enam Provinsi Indonesia.

Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penulis di masa mendatang.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk jadi pembandingan dengan penelitian yang hampir sama selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik.
4. Penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber untuk dapat mengetahui isu mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pelajar, untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

3. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menganalisa mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

